

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam membantu peneliti memahami pengetahuan yang telah ada dalam bidang yang diteliti, mengidentifikasi celah pengetahuan yang perlu diisi, dan menunjukkan orisinalitas penelitian baru yang akan dilakukan. Sebelum menyusun penelitian ini, peneliti telah mempelajari beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini nantinya.

1. Muhammad Risman Wahyudi, 2022, **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG (Studi Kasus Desa Karangan Putih dan Kelurahan Pulau)**, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin kompleks akibat pertambahan penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya sosialisasi pemerintah. Kondisi tersebut mendorong perlunya pengelolaan sampah yang baik melalui keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Tabalong telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sebagai pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pengelolaan sampah yang belum berfungsi secara optimal, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan dan pemilahan sampah kepada masyarakat. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, khususnya di Desa Karang Putih dan Kelurahan Pulau, serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-*study kasus* dengan teori implementasi model Van Meter & Van Horn. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik *purposive sampling* dengan sumber data sebanyak 14 orang. Data dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji Kredibilitas Data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif dan mengadakan *member check*. Penelitian menyimpulkan sesuai variabel Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn sudah baik, yaitu sub variabel: kebijakan standar dan sasaran kebijakan serta ukuran standar dan sasaran kebijakan sudah tersedia; etos

kerja dalam pelaksanaannya sudah baik; dana/anggaran sudah tersedia dan direalisasikan sesuai perencanaan; terdapat dukungan dan koordinasi dengan instansi lain; kompetensi, dukungan elit politik dan kondisi sosial sudah baik, beragam serta mendukung; kondisi ekonomi sudah mendukung dan ada partisipasi aktif masyarakat membayar iuran sampah; kondisi politik, kepuasan pelaksana, saran pelaksana dan kepuasan masyarakat mengenai kebijakan sudah baik serta mendukung; dan terdapat saran masyarakat mengenai kebijakan yang mendukung implementasi pengelolaan sampah. Faktor-faktor yang menghambat yaitu kurangnya kuantitas sumber daya manusia, kurangnya sarana pengelolaan sampah dan tanggapan masyarakat terkait sosialisasi produk hukum berupa implementasi pengelolaan sampah kepada masyarakat belum cukup ideal. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan kuantitas sumber daya manusia pengelola sampah, peningkatan anggaran dan membuat program sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat/komunitas. Berdasarkan hasil penelitian untuk mengoptimalkan implementasi, disarankan Dinas LH menjadikan temuan ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya peningkatan implementasi Perda. Pemerintah desa/kelurahan diharapkan meningkatkan kuantitas sumber daya, fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Masyarakat lebih berpartisipasi aktif, tidak sekedar membayar retribusi dan mengandalkan petugas tetapi terlibat proses pemilahan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah.

2. Muhamad Yusuf, 2023, **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN BARITO TIMUR**. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin kompleks akibat pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar pengelolaan sampah. Namun, di Kecamatan Pematang Karau masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti keterbatasan tempat sampah dan TPS, kurangnya armada pengangkutan, pengangkutan yang belum optimal, pengelolaan TPA yang belum maksimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya penumpukan sampah di pinggir jalan dan sungai. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan teori implementasi model Van Meter & Van Horn. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui informan dengan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 7 orang. Dianalisis dengan

kondensasi data, tampilan data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dikaji dengan uji kredibilitas data yakni perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Pematang Karau sudah optimal. Hal ini dilihat dari indikator yang sudah optimal dan kurang optimal yaitu terdiri dari sarana dan prasarana yang dipakai seperti mobil pick-up, daya dukung masyarakat, koordinasi antar organisasi sudah terjalin dengan baik, tanpa ada campur tangan politik dalam kebijakan pengelolaan sampah. Kemudian terdapat indikator yang kurang optimal yaitu dari segi pengangkutan sampah yang hanya dilakukan sekali dalam seminggu sehingga terjadinya penumpukan sampah yang ada di bak sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya terdiri dari faktor penghambat yakni kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan masih menggunakan metode open dumping. Faktor pendukung yakni adanya mobil untuk mengangkut sampah dan kebersihan lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan Camat Pematang Karau Kabupaten Barito Timur untuk meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat. Pegawai Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur agar selalu memberikan pengawasan terhadap program terutama mengenai kebijakan pengelolaan sampah. Kepala Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur agar lebih sering berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten, Kecamatan. Masyarakat khususnya Desa

Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur agar lebih aktif berperan dalam kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster (Sahya Anggara, 2018: 232), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu).

Menurut Van Meter dan Van Horn (Sahya Anggara, 2018: 232), Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

2. Kebijakan Publik

Menurut Dye (Leo Agustino, 2022:14) kebijakan publik: "... *what governments do, why they do it, and what difference it makes*". Merujuk definisi tersebut dapatlah disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*).

Bahkan dalam sudut pandang lain, Dye (Leo Agustino, 2022:14) menulis pula kebijakan publik sebagai: "*Anything a government chooses to do or not to do.*" Menurut takrif ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik.

Jadi dapat disimpulkan kebijakan publik adalah segala tindakan maupun keputusan pemerintah, baik melakukan sesuatu maupun memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang memiliki tujuan tertentu dan menghasilkan dampak bagi masyarakat.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*).

Van Meter dan Van Horn (Joko Pramono, 2020:3) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya ada model-model implementasi kebijakan publik, yaitu

a. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

George C. Edward III (Leo Agustino, 2022: 154-158) model implementasi yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremdakan oleh Edward III, terdapat empat

variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- 1) Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

a) Transmisi

Adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transisi ini yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksana kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

c) Konsisten

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Hal ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

- 2) Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Meskipun isi kebijakan telah

dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a) Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencangkupi, memadadai, atau tidak kompeten di bidangnya.

b) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu:

- (1) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberikan perintah untuk melakukan tindakan.
- (2) Inforasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pada terhadap hukum.

c) Wewenang

Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legilitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakanyang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proes implementasi kebijakan.

d) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang ahrus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor

penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau suatu kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

a) Efek disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b) Melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*)

Dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam konteks birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada “pembentukan” *system* pelayanan *public* yang optimis, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.

c) Insetif

Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4) Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang dan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*,

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

a) Membuat *Standar Operating Procedures* (SOP)

Adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

b) Melaksanakan fragmentasi

Tujuan untuk menyebarkan tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

b. Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Leo Agustino, 2020:159) Pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih).

c. Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Joko Pramono, 2020:7-8) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

d. Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Leo Agustino, 2022:150-151) disebut

dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan publik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

4. Pengelolaan

Pengertian pengelolaan, pengelolaan itu berakar dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu “manajemen” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Maka disimpulkan pengelolaan itu adalah pengadministrasian pengaturan atau penataan suatu kegiatan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Banyak didefinisikan oleh para ahli tentang pengelolaan. Terry (Jusmawati, 2018:37) mengartikan pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Jhon D. Millet (Jusmawati, 2018:37) Pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

5. Sampah

Selama ini manusia menganggap sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan dianggap tidak berguna lagi, tanpa menyadari potensi nilainya untuk didaur ulang atau diolah menjadi sumber daya baru.

Menurut Kamus Besar Indonesia (Hendra Gunawan, dkk, 2017:22) sampah adalah kotoran, sesuatu yang tak terpakai dan dibuang, semua barang yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi.

Menurut Murtadho dan Sa'id (Hendra Gunawan, dkk, 2017:22) Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber suatu aktivitas manusia maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai arti ekonomi, bahkan bernilai ekonomi negatif.

6. Pengelolaan Sampah

Menurut UU No.18 tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi mencakup juga aspek nonteknis, seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktivitas penanganan tersebut. Upaya pengurangan dan penanganan sampah, pemerintah menjadikan konsep 3R sebagai dasar penanganan sampah menurut UU-18/2008. 3R adalah *Reduce* (pembatasan) *Reuse* (guna-ulang) & *Recycle* (daur-ulang).

a. Jenis-jenis sampah

Berdasarkan bentuknya sampah dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu : sampah padat, sampah cair dan sampah gas. Jenis sampah padat berdasarkan zat asal yang dikandungnya dibagi dua yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari benda-benda atau makhluk hidup, contohnya: guguran dedaunan, sisa buah, sisa sayuran dan lain sebagainya. Sampah organik sifatnya mudah hancur dan mudah diolah. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda-benda atau zat-zat mati. Misalnya:

besi, kaca, kaleng, plastik, dan lain-lain. Sampah anorganik sifatnya sulit hancur dan sulit diolah.

b. Pengolahan Sampah

Sampah organik berasal dari tumbuhan sehingga dapat dimanfaatkan untuk:

- 1) Makanan ternak: sampah yang telah dipilah ada yang dapat digunakan untuk makanan ternak seperti kambing, sapi, ayam, itik, bebek, kelinci dan hewan ternak lainnya.
- 2) Kompos: Pupuk kompos memberikan banyak keuntungan, antara lain: secara ekologis tidak merusak lingkungan, bahan yang tersedia melimpah, mudah membuatnya dan tidak memerlukan peralatan mahal untuk membuatnya dan unsur hara yang terkandung di dalamnya lebih tahan lama dibandingkan pupuk buatan.

Untuk pengolahan sampah anorganik dapat dilakukan proses:

- 1) Daur ulang: beberapa jenis sampah yang kita anggap tidak berguna, sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kejelian dalam memilah-milah sampah menjadikan berbagai sampah anorganik seperti: botol, kaleng, plastik, kertas, karton dan aneka sampah lainnya memungkinkan untuk dimanfaatkan ulang atau didaur ulang.
- 2) Dijual: Berbagai sampah lainnya dapat dijual ke pasar loak, untuk selanjutnya diolah kembali.

c. Daur Ulang Sampah

1) Sampah Organik

Bila kita sadari, sampah sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Selama masih ada manusia dan makhluk hidup lain akan selalu menghasilkan sampah, dalam lingkaran kehidupan sampah adalah tahapan penting bagi kehidupan makhluk lainnya. Sampah organik menghidupkan bakteri, lalu bakteri menyuburkan tanah dan sangat bermanfaat bagi tanaman, yang akhirnya tanaman dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Sampah bukan lagi sesuatu yang harus dihindari.

2) Sampah Anorganik

Mendaur ulang sampah kertas tidaklah sulit dan memerlukan biaya yang tinggi. Saat ini beragam hasil daur ulang kertas dapat dibentuk sesuai selera, bahkan seringkali dijadikan souvenir. Umumnya yang sering kita lihat berupa kotak pensil, kartu, *block note*, kotak persiapan dan lain sebagainya. Membersihkan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti mendaur ulang sampah kertas. Kegiatan ini tak sekedar menjadikan lingkungan hidup menjadi bersih, namun juga dapat mendatangkan pendapatan.

7. Sampah Rumah Tangga

Menurut Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 (Gusman Arsyad, dkk, 2024:152) pengertian sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan

industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

C. Kerangka Pemikiran

Setiap kegiatan penelitian ilmiah, harus dilandasi oleh kerangka pemikiran agar penelitian dan penulisan laporan penelitian dapat tersusun secara sistematis. Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah bahwa implementasi sangat perlu dalam melaksanakan kebijakan untuk keterlibatan masyarakat dalam menunjang kebijakan publik.

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Dalam hal ini fokus penelitian mengambil teori tentang Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh teori Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III (Leo Agustino, 2022: 154-158):

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi/ Sikap
4. Struktur Birokrasi

Berikut ini alur dari penelitian, dan bisa dilihat pada gambar 2.1 kerangka pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

